

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Armstrong Gary dan Philip Kotler, 2008, *Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi 12 Jilid 1*, Erlangga, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Djubaidah, Neng, 2012, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta.

Faqih, Aunur Rahim dan Umar Haris Sanjaya, 2017, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.

Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Frost, Raymond and Judi Strauss, 2001, *E-Marketing Second Edition*, Prentice Hall, New Jersey.

Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta.

Hartono, Jogiyanto, 2013, *Sistem Teknologi Informasi Bisnis Pendekatan Strategis*, Salemba Empat, Jakarta.

Hatta, Mohammad, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta.

- Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Jaworski, Bernard J. and Jeffrey F. Rayport, 2002, *Introduction to E-Commerce*, Mc-Graw Hill, Boston.
- Kurniadi, Stefanie, Danis Puntoadi, Sarita Sutedja, Rex Marindo, dan Dira Illanoor, 2013, *Marketing Cappuccino Campur dan Racik Marketing Anda Sesuai Selera*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remadja Rosdakarya, Bandung.
- Moleong, Lexy J., 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remadja Rosdakarya, Bandung.
- Pitlo, A. dan Sudikno Mertokusumo, 2013, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Poernomo, Bambang, 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Widodo, 2013, Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (*Cybercrime Law*):

Telaah Teoritik dan Bedah Kasus, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

B. TUGAS AKHIR

Haryogi Permana, 2016, “*Peran Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) melalui Cyberspace*”, Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Indrawan, Helmy, 2013, “*Peran Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penganggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Yunita Sinta Dewi, 2015, “*Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Tindakan Pelacuran*”, Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

C. INTERNET

Amelia, Mei, “Pengacara Akui Aris ‘Kepeleset’ Buat Situs nikahsirri.com”,
<https://news.detik.com/berita/3682065/pengacara-akui-aris-kepeleset-buat-situs-nikahsirricom> diakses pada tanggal 13 Januari 2018.

Amelia, Mei, “Polisi Tetapkan Pemilik Situs nikahsirri.com Jadi Tersangka”,
<https://news.detik.com/berita/d-3655708/polisi-tetapkan-pemilik-situs-nikahsirricom-jadi-tersangka>, diakses pada tanggal 21 Januari 2018.

Antony, Noval Dhwinuari, “Pemilik Ditahan, Situs Nikahsirri.com Masih Bisa Diakses”, <https://news.detik.com/berita/d-3660068/pemilik-ditahan-situs-nikahsirricom-masih-bisa-diakses>, diakses pada tanggal 13 Januari 2018.

Asfar, Adib, “Istri Akui Pemilik Nikahsirri.com Stres Setelah Kalah Pilkada Banyumas”, <http://www.solopos.com/2017/09/25/istri-akui-pemilik-nikahsirri-com-stres-setelah-kalah-pilkada-banyumas-854240>, diakses pada tanggal 13 Januari 2018.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (KBBI Daring)*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah%20siri> diakses pada tanggal 27 September 2017.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (KBBI Daring)*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/internet>, diakses pada tanggal 29 Desember 2017.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (KBBI Daring)*, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia,

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lelang> diakses pada tanggal 13
Januari 2018.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Dalam Jaringan (KBBI Daring), Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia,

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bukti> diakses pada tanggal 25
Februari 2018.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Dalam Jaringan (KBBI Daring), Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia,

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wilayah> diakses pada tanggal 26
Februari 2018.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Dalam Jaringan (KBBI Daring), Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia,

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tujuan> diakses pada tanggal 1
Maret 2018.

Destryawan, Dennis, “Terus Bertambah, Kini Member Nikahsirri.com Berjumlah

5.300 Orang”, [http://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/26/terus-
bertambah-kini-member-nikahsirricom-berjumlah-5300-orang](http://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/26/terus-bertambah-kini-member-nikahsirricom-berjumlah-5300-orang) diakses
pada tanggal 13 Januari 2018.

Edinayanti, “Baru 4 Hari Diluncurkan Situs Nikahsirri.com Diblokir
Kemenkominfo, Ini Profil Pendirinya”,
<http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/09/24/baru-4-hari-diluncurkan-situs-nikahsirricom-diblokir-kemenkominfo-ini-profil-pendirinya> diakses pada tanggal 13 Januari 2018.

Ferry, Oscar, “MUI: Nikahsirri.com Bisnis Zina Terselubung”,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170925092312-20-243761/mui-nikahsirricom-bisnis-zina-terselubung> diakses pada tanggal 26 Januari 2018.

Hasan, Rizki Akbar, “Indonesia Masih Darurat Tindak Pidana Perdagangan Orang”,
<https://www.liputan6.com/global/read/3196958/indonesia-masih-darurat-tindak-pidana-perdagangan-orang> diakses pada tanggal 24 April 2018.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “*Press Release Lelang perawan dan Kawin Kontrak Bentuk Eksploitasi Kaum Perempuan dengan siaran pers nomor: B-102/Set/Rokum/MP 01/09/2017*”, Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, <http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1500/lelang-perawan-dan-kawin-kontrak-bentuk-eksploitasi-kaum-perempuan> diakses pada tanggal 27 September 2017.

NIKAHSIRRI, <https://www.nikahsirri.com/> diakses pada tanggal 27 September 2017.

Pitoko, Ridwan Aji, “*Polisi Tangkap Pendiri dan Pemilik Situs Nikahsirri.com*”,

<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/24/12542441/polisi-tangkap-pendiri-dan-pemilik-situs-nikahsirricom>, diakses pada tanggal 27 September 2017.

Qodar, Nafiysul, “Jumlah *Client* Nikahsirri.com Ternyata 5.300 Orang”,

<http://news.liputan6.com/read/3108256/jumlah-Client-nikahsirricom-ternyata-5300-orang> diakses pada tanggal 13 Januari 2018.

Sumantri, Arga, “Pemilik Situs Nikah Siri Dapat Fee 20% Setiap Transaksi”,

http://news.metrotvnews.com/hukum/dN6g5Epb-pemilik-situs-nikah-siri-dapat-fee-20-setiap-transaksi?fb_comment_id=1316705345107635_1317122235065946#f3210b165a26b94 diakses pada tanggal 13 Januari 2018.

D. WAWANCARA

Beja, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), Penyidik Madya 2 Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY), Wawancara Pribadi selaku Narasumber pada tanggal 15 Januari 2018.

Heryanto, Deny, AKBP, Kepala Sub Direkrorat Direktorat Reserse Kriminal Umum (Kasubdit Ditreskrimum) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara (Polda Maluku Utara), Wawancara Pribadi selaku Narasumber pada tanggal 11 Januari 2018.

Indraguna, K. R. A. T., Henry, Advokat Henry Indraguna *and Partners Law Office*, Wawancara Pribadi selaku Responden mantan Kuasa Hukum pemilik situs www.nikahsirri.com.

Mudzakir, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), Wawancara Pribadi selaku Narasumber pada tanggal 1 Februari 2018.

Noviyati, Annisa, Hakim Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA, Wawancara Pribadi selaku Narasumber pada tanggal 9 Januari 2018.

Ratnawati, Tri, Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Wawancara Pribadi selaku Narasumber pada tanggal 8 Januari 2018.

Sulistiyono, Budi, Jaksa Fungsional Bidang Pembinaan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Wawancara Pribadi selaku Narasumber pada tanggal 10 Januari 2018.

Sobirin, Ali, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Wawancara Pribadi selaku Narasumber pada tanggal 10 Januari 2018.

Taufiq, Muhammad, Advokat *Law Firm* Muhammad Taufiq *and Partners*, Wawancara Pribadi selaku Narasumber pada tanggal 12 Januari 2018.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4558).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4674).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan
United Nations Convention Against Transnational Organized Crime
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana
Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4960).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan
*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons,
Especially Women and Children, Supplementing the United Nations
Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk

Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050 Tahun 1975).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991).

F. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.